

Judul : Hasil survei KPK, hampir 91 % mahasiswa pakai jasa joki skripsi, kok bisa?
Tanggal : Jumat, 09 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Hasil Survei KPK Hampir 91% Mahasiswa Pakai Jasa Joki Skripsi, Kok Bisa?

Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup mengejutkan. Hasilnya, hampir 91 persen mahasiswa mengerjakan tugas akhir atau skripsi melalui praktik joki. Pristiwa ini pun menjadi perhatian Komisi X DPR dan pemerintah pendidikan.

"Masih ada temuan terkait mahasiswa yang membayar pihak lain untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Ini seperti joki tugas," kata Plh. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Dian Novianthi dalam peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 di Gedung Juang, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Selain itu, SPI Pendidikan 2026 juga menemukan masalah integritas lain di perguruan tinggi. Di antaranya, 50 persen responden melaporkan masih terjadi praktik menyontek saat ujian di

94 persen satuan pendidikan tinggi yang disurvei.

Sebelumnya, SPI Pendidikan 2026 tercatat berada di angka 73,30 atau masuk kategori adaptif. Adapun angka tersebut meningkat dibandingkan skor tahun 2024 yang berada di angka 69,5 dan menandakan kondisi rentan korupsi.

"Kita bersyukur ya, skornya sudah cukup tinggi. Posisinya adalah adaptif, 73 poin sekian dibandingkan dua tahun sebelumnya 69,5 ya," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam acara yang sama. Setyo mengatakan, meski SPI Pendidikan meningkat dari tahun 2024, masih terdapat beberapa daerah dengan nilai SPI yang masuk kategori korektif sehingga dibutuhkan perbaikan.

"Saya berharap semua pihak tidak alergi manakala kemudian ada daerah tertentu yang dianggap masih kurang. Itu kesempatan untuk kita perbaiki," ujar dia.

Adapun SPI Pendidikan 2026 ini melibatkan 42.810 responden yang terdiri dari peserta didik, murid, dan mahasiswa. Untuk tingkat SD, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5 atau mereka yang dianggap sudah mampu membaca dan menjawab pertanyaan.

Kemudian, SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, sementara SMA kelas 10 dan 11. Untuk mahasiswa, survei melibatkan mahasiswa semester 3 sampai 8. Selain itu, survei juga melibatkan orang tua khusus untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Kemudian, tenaga pendidik berasal dari satuan pendidikan yang terpilih. Serta responden lain, yakni kepala sekolah dan pimpinan perguruan tinggi.

Metode pengumpulan data menggunakan tiga cara. Pertama, secara online dengan pengisian melalui tautan kuesioner yang dikirimkan melalui

WhatsApp blast dan email blast.

Kedua, CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), yakni pengisian data berbasis situs web bagi satuan pendidikan yang memiliki keterbatasan, seperti tidak memiliki ponsel, keterbatasan privasi data, atau merupakan sekolah berasrama.

Ketiga, CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing), yakni pengisian data secara mandiri berbasis aplikasi yang difasilitasi oleh tim survei secara langsung di lapangan bagi satuan pendidikan yang memiliki keterbatasan akses internet.

Selain itu, sebanyak 42.810 satuan pendidikan terlibat sebagai responden, yang terdiri dari 41.720 sekolah dasar dan menengah serta 1.090 perguruan tinggi.

Hasil survei mengenai joki skripsi pun menjadi perbincangan. Misalnya, Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri

Faqih. Menurut dia, hasil survei tersebut menunjukkan adanya darurat integritas akademik. "Ini memalukan sekaligus menampar wajah pendidikan tinggi kita," ucap Fikri Faqih kepada *Rakyat Merdeka*, Kamis (8/10/2026).

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Feriyansyah mengatakan, fenomena joki skripsi terjadi karena turunnya etika akademik. Selain itu, terdapat masalah pada integritas mahasiswa maupun pihak yang memberikan jasa pembuatan tugas.

"Kita mengalami satu krisis nilai pendidikan tinggi terkait dengan integritas akademik," ungkap Feriyansyah kepada *Rakyat Merdeka*, Jumat (9/10/2026).

Untuk mengetahui pandangan Abdul Fikri Faqih dan Feriyansyah mengenai praktik joki skripsi di perguruan tinggi, berikut wawancaranya.

ABDUL FIKRI FAQIH, Anggota Komisi X DPR

Hasil Ini Menunjukkan Kampus Sedang "Sakit"



Bagaimana Anda melihat hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menemukan 91 persen praktik joki untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi di perguruan tinggi?

Saya melihat ini sebagai kondisi darurat integritas akademik yang memalukan sekaligus proses peralihan dari tingkat SMA. Di saat itu sudah mulai diajarkan tentang etika akademik. Kemudian ada budaya akademik. Kenapa? Karena kampus itu memiliki penjaminan terhadap etika akademik. Di Indonesia, seakan-akan yang penting gelarnya. Tetapi, belum tentu cara memperoleh gelar itu memberikan satu pengalaman intelektual yang seharusnya melekat kepada dirinya dengan kualifikasi yang dia miliki.

Apa maksudnya Anda menyebut kampus sedang "sakit"?
Kampus mencetak sarjana secara kuantitas, tetapi secara kualitas dan

moral, kampus mengalami kemunduran. Ini tidak bisa hanya disikapi dengan imbauan, melainkan membutuhkan investigasi menyeluruh ke dalam sistem evaluasi pendidikan tinggi kita.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) berpendangan, mahasiswa dihadapkan pada urusan administratif, sementara kualitas pembimbingan memiliki beban kerja dosen yang luar biasa. Apa tanggapan Anda terkait hal ini?

Kami di Komisi X DPR sepemahaman dengan analisis P2G. Ketika kesejahteraan dosen masih jauh dari kata ideal, banyak dari mereka terpaksa mencari tambahan penghasilan di luar kampus, seperti mengajar di banyak tempat atau mengerjakan proyek. Di saat yang sama, dosen dibebani urusan administratif yang menguras

waktu dan energi.

Apa dampaknya?
Waktu dan kualitas untuk membimbing mahasiswa menjadi sangat minim. Mahasiswa merasa ditinggalkan, dikejar tenggat waktu kelulusan oleh sistem kampus untuk memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi. Lalu, akhirnya mengambil jalan pintas melalui joki.

Solusi nyata yang dapat dilakukan Pemerintah seperti apa?

Harus segera dilakukan dekratisasi administrasi dosen dan peningkatan standar kesejahteraan dosen. Dosen harus dikembalikan ke muaranya sebagai pendidik dan peneliti, bukan pekerja klerikal administratif. Jika akar masalah penyalahgunaan ini tidak diselesaikan, mahasiswa akan terus mencari "bantuan" di luar. ■ **news**

FERIYANSYAH, Kepala Bidang Litbang P2G

Perlu Adanya Penjagaan Norma & Etik Akademik



Bagaimana Anda melihat hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menemukan 91 persen praktik joki untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi di perguruan tinggi?

Kita mengalami satu krisis nilai pendidikan tinggi terkait dengan integritas akademik. Jadi, kalau ada temuan tentang joki skripsi, saya kira ini bukan tentang persoalan mahasiswa saja.

Terus, persoalan apa lagi?

Ini sebagai gejala dari persoalan yang lebih besar, lebih struktural dalam sistem pendidikan tinggi. Sebab, kalau dalam mekanisme pasar, joki skripsi itu kan ada permintaan, semestinya ada supply and demand. Saya kira, untuk hari ini memang harus dilihat lebih dalam lagi, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa ada supply and demand? Apakah ada proses kejeleman dari

mekanisme skripsi? Ataukah memang perlu mengubah satu cara agar penjagaan terhadap integritas akademik itu betul-betul dinaikkan, ditingkatkan, atau dijaga.

Menurut Anda, apa yang menjadi alasan mahasiswa memilih memakai jasa joki skripsi?

Masalahnya saat ini, mahasiswa menghadapi satu sistem administratif yang sangat luar biasa, tekanan kelulusan tinggi, pendampingan perkuliahan yang terbatas, kemudian beban kerja dosen yang luar biasa. Sementara, di luar kampus mereka mendapatkan fasilitas pembuatan tugas akhir, fasilitas, dan sebagainya. Jadi, memang dibutuhkan cara yang baru.

Solusi dari Anda?

Sebetulnya yang kita butuhkan adalah bagaimana menjaga norma-norma atau etika-etika akademik. Bukan hanya mahasiswa yang dipersalahkan. Karena mahasiswa itu kan orang yang sedang belajar, hingga akhirnya ada yang melakukannya ketika memang sangat butuh.

Untuk pengawasan dari kampus terkait praktik joki skripsi ini seperti apa?

Ketika mereka masuk kampus, ini kan ada proses seleksi, proses peralihan dari tingkat SMA. Di saat itu sudah mulai diajarkan tentang etika akademik. Kemudian ada budaya akademik. Kenapa? Karena kampus itu memiliki penjaminan terhadap etika akademik. Di Indonesia, seakan-akan yang penting gelarnya. Tetapi, belum tentu cara memperoleh gelar itu memberikan satu pengalaman intelektual yang seharusnya melekat kepada dirinya dengan kualifikasi yang dia miliki.

Sebetulnya yang kita butuhkan adalah bagaimana menjaga norma-norma atau etika-etika akademik. Bukan hanya mahasiswa yang dipersalahkan. Karena mahasiswa itu kan orang yang sedang belajar, hingga akhirnya ada yang melakukannya ketika memang sangat butuh.